

PILKADA LANGSUNG DAN PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI



Dr. H. Deden Ramdan, M.Si, CFRM, DBA
Wakil Rektor III Universitas Pasundan Bandung

Pendahuluan

Pilkada secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pilkada langsung dianggap penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat, karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati dan wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada langsung juga merupakan sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat, ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah.

Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah; antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, ketersediaan kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2014. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung seperti ini.

Dalam pelaksanaannya Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) di wilayah masing-masing. Tugas yang dilaksanakan KPU ini yaitu mengatur pelaksanaan Pilkada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan Pilkada

Pilkada langsung dan serentak menjadi pilihan terbaik dengan asumsi terjadinya optimasi penggabungan Pilkada di Indonesia yang paling ideal berdasarkan kriteria kontinuitas jalannya pemerintahan daerah, kesiapan aparat keamanan, menghindari kejenuhan masyarakat dan efisiensi biaya karena kepala daerah yang berakhir dalam tahun yang sama dilaksanakan Pilkada secara bersamaan

Substansi

Robert Alan Dahl dalam *Democracy and Its Critics* (2004) mengisyaratkan bahwa pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat merupakan keharusan agar pemerintah daerah senantiasa menjunjung akunt-

abilitas dan tanggung jawabnya. Tentu, sebagai rakyat kita memahami bahwa akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat bernilai. Dua hal itulah santapan bagi nurani pemangku kekuasaan di daerah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat di daerah seperti yang ditegaskan oleh B. C. Smith (2000) bahwa desentralisasi juga harus membawa faedah bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, demokrasi sistem pemerintahan di daerah harus dibangun secara kokoh..

Sejumlah permasalahan memang masih terjadi dalam pelaksanaan pilkada ini seperti daftar Pemilih tidak akurat. Permasalahan daftar pemilih yang tidak akurat dalam Pilkada, Permasalahan lain dalam proses pencalonan yang selama ini terjadi disebabkan oleh konflik internal partai politik/gabungan partai politik dan keberpihakan para anggota KPU dalam menentukan pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada. hal lain adalah permasalahan pada Masa kampanye. kampanye yang diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengenalan pemilih terhadap calon kepala daerah agar pemilih mendapatkan informasi yang lengkap tentang semua calon, menjadi tidak tercapai. Untuk itu ke depan perlu pengaturan masa kampanye yang cukup dan peningkatan kualitas kampanye agar dapat mendidik pemilih untuk menilai para calon dari segi program. Manipulasi penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. adalah masalah berikutnya disamping masih

adanya penyelenggara Pemilu yang tidak adil dan netral semua permasalahan tersebut memang harus segera dicari formulasi solusi yang tepat dan benar, namun demikian tentu tidak kemudian pilkada langsung dan serentak ini dihapuskan karena secara evidensial terbukti mampu memenuhi prasyarat demokrasi

Secara perdefinisi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos*, yang berarti rakyat, dan *kratos*, yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya berada di tangan rakyat. Semua anggota masyarakat yang memenuhi syarat pilih diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu.

Pelaksanaan demokrasi ini telah dilakukan sejak dahulu di berbagai daerah, hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian disebut sebagai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan; musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan. Indonesia pertamakali melaksanakan pemilu pada akhir tahun 1955, yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan.

Penutup

Dinamika politik yang terjadi di era reformasi ini telah memberikan kesempatan dan peran bagi elit politik lokal yang cukup bermakna. Namun penyempurnaan masih harus

dilakukan agar pemerintahan daerah sebagai aktualisasi dari dinamika politik lokal semakin menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu pengaturan baik dalam tataran supra maupun infra struktur politik dituntut untuk senantiasa memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis.

Sementara itu susunan pemerintahan daerah akan menjadi dasar bagi pembangunan interaksi di antara mereka. Demikian pula, susunan pemerintahan tersebut juga dapat menjadi konteks dari peranan yang dimainkan oleh masing-masing susunan pemerintahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan implikasinya terhadap pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik masyarakat yang terbangun melalui pemilu kepala daerah langsung dan serentak diharapkan menciptakan sistem politik yang demokratis di tingkat lokal dan pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya sistem politik yang demokratis di tingkat nasional.

Pilkada langsung dan serentak sejatinya merupakan konsolidasi demokrasi yang harus dijadikan konsensus untuk menyempurnakan sistem demokrasi, baik yang berkaitan dengan substansi, struktur maupun budaya politik, demokrasi sebagai sistem perlu didukung oleh sistem politik yang jelas dan terukur, yang efektivitasnya akan banyak tergantung pada kualitas perundang-undangannya tegaknya sistem hukum yang berlaku, *political will* dari

penyelenggara negara, kelengkapan sarana dan prasarana; kualitas sumberdaya manusianya baik mental maupun intelektual; dan tumbuhnya kesadaran serta partisipasi politik dari segenap elemen masyarakat secara luas. Dimana dalam posisi dan kondisi seperti ini pilkada diasumsikan telah mampu memenuhi kualitas demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

Arbi Sanit. 2012. *Pilkada dan Sistem politik Indonesia*, Rajawali pers. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dhuroruddin Mashad. 2008. *Reformasi Sistem Pilkada dan Peran Sospol TNI*. Jakarta: P.T. Gramedia Widasarana Indonesia,

Partai-partai politik Indonesia. *Idiologi dan dan program 2004 -2009.*

kompas Jakarta tim Litbang

Eep Saepulloh Fatah. 1998. *Catatan tentang Kekuasaan*. Bandung: Rosda

----- 2000. *Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru*. Bandung: Rosda

Subhan Sd. 1996. *Langkah Merah, Gerakan PKI 1950-1955*. Yogyakarta: Benteng

Mun'im A. Sirry. 2003. *Dilema Islam Dilema Demokrasi, Pengalaman Barat Muslim Dalam Transisi Indonesia*. Bekasi: Bubus Press

Mengawal Transisi Demokrasi, Koran Tempo, Jum'at, 312 agustus 2001

Pilkada Islam, Demokrasi, dan kurtur politik, media Indonesia, Jum'at 28 desember 2001



Keluarga Besar

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PASUNDAN

Mengucapkan Selamat dan Sukses

KEPADA

WISUDAWAN/WISUDAWATI SARJANA DAN PASCASARJANA
GELOMBANG II 2017-2018

Dekan

ttd

Dr. Yusman Taufiq, M.P.